

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setelah Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh Amerika, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang akhirnya menyerah. Hal ini menandakan bahwa Perang Asia Timur Raya akhirnya berakhir. Daerah-daerah yang masih dikuasai oleh tentara Jepang hal ini pada mulanya tidak segera diketahui oleh rakyat karena kekurangan alat informasi. Meski demikian, tingkah laku tentara Jepang mulai tidak biasa. Mereka mulai mengumpulkan seluruh senjata-senjata *Gyugun* dan membubarkannya. Di Padang dilaksanakan pembubaran pada tanggal 16 Agustus 1945. Kepada mereka hanya dikatakan bahwa perang telah berakhir dan tidak menyatakan kalah atau menyerah, sehingga anggota-anggota *Gyugun* kembali ke kampung masing-masing dengan tidak mengetahui tentang apa yang sebenarnya telah terjadi dan apa yang akan terjadi.<sup>1</sup>

Tenggang waktu antara menyerahnya Jepang pada tanggal 14 Agustus dan masuknya tentara sekutu di Indonesia beberapa minggu kemudian telah memungkinkan tokoh-tokoh Republik di Jawa dan Sumatera membangun pijakan yang kuat bagi kemerdekaan Indonesia, yang tak dapat diungkai lagi oleh penjajah. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada mulanya masih belum diketahui oleh sebagian besar rakyat Indonesia di beberapa daerah di luar Pulau Jawa pada umumnya dan Sumatera Tengah khususnya. Hal ini diakibatkan

---

<sup>1</sup>Ahmad Husein, dkk., *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/Riau 1945-1950 Jilid I*, (Jakarta: BPSIM, 1991), hlm., 79.

ketatnya pengawasan Jepang sehingga mereka berhasil memperlambat berita itu meskipun gagal merahasiakannya. Karena tidak lama kemudian berita kekalahan Jepang dan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil diketahui oleh rakyat di Sumatera Tengah.<sup>2</sup>

Setiap upaya untuk merealisasikan Republik di Indonesia salah satunya merupakan inspirasi daerah. Gerakan tersebut telah dimulai di Sumatera Barat. Meskipun kekuasaan Jepang merintangi setiap usaha penyiaran berita proklamasi, kantor PTT di Padang dan Bukittinggi tampaknya telah menerima berita itu juga dari pengawas kantor berita *Domei* di Jakarta atau Bandung. Mereka segera memberitahu tokoh-tokoh Sumatera Barat, dan dalam jangka waktu singkat salinan teks proklamasi telah beredar.<sup>3</sup>

Para pemuda di Sumatera Barat telah menjadi kekuatan andalan perjuangan dan menganggap diri mereka sebagai garda depan revolusi, walaupun secara khusus organisasi pemuda memainkan peranan penting selama minggu-minggu pertama revolusi, mereka tetap dibimbing oleh tokoh yang lebih tua. Satu fungsi utama yang dilakukan mereka adalah sebagai media bagi terwujudnya kerjasama antara orang-orang Minangkabau yang sebelumnya adalah anggota militer Jepang dan organisasi pemuda bergabung bersama-sama sebelum mereka dipanggil kembali sebagai kekuatan militer republik.<sup>4</sup>

Ciri organisasi pemuda di Sumatera Barat ditentukan oleh peranan *Giyugun*. Pada saat berita proklamasi kemerdekaan sampai di Sumatera Barat,

---

<sup>2</sup>Pertempuran Padang dan Sekitarnya, *Konsep Naskah*, 1983, hlm., 5.

<sup>3</sup>Audrey Kahin, *Perjuangan Kemerdekaan: Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1949*, (Padang: MSI Cabang Sumatera Barat, 1979), hlm., 86-87.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm., 88.

kelompok pemuda *Gyugun*lah yang memulai menyusun kembali kekuatan mereka di Padang dan ditempat-tempat lain di daerah ini. Pemuda bekas *Gyugun* beserta anggota-anggota organisasi pendukungnya mendorong didirikannya BPPI (Balai Penerangan Pemuda Indonesia) di Padang tak lama setelah proklamasi. Dibawah pimpinan pendirinya Ismail Lengah, mantan perwira *Gyugun*, mayoritas anggota BPPI adalah bekas *Gyugun*. Organisasi ini dibentuk untuk menjalankan tujuan ganda sebagai sumber informasi terpercaya untuk masyarakat Padang, dan sebagai pos terdepan untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih radikal.<sup>5</sup>Badan ini direncanakan pada lahirnya hanya merupakan pusat penerangan pemuda. Namun kedalam ia akan berfungsi sebagai organisasi inti pemuda revolusioner untuk membakar dan mempelopori perjuangan seluruh massa rakyat membela proklamasi.<sup>6</sup> Markasnya mengambil tempat disebuah bangunan bertingkat, bekas Hotel Pasa Gadang, terletak tepat berseberangan dengan surau batu atau mesjid di Jalan Pasa Mudik dan Pasa Gadang.

Langkah pertama dalam menjalankan fungsi BPPI ialah menyebarluaskan pamlet yang memuat teks proklamasi 17 Agustus 1945 di Jakarta yang telah diperkuat dengan pernyataan dari Mohammad Sjafei, sebagai rakyat Indonesia di Pulau Sumatera. Diberikan juga penerangan tentang perjuangan dan pertempuran yang dihadapi penduduk di Pulau Jawa yang tengah bergejolak. Penerangan seperti ini lebih banyak dilakukan di masjid, langgar-langgar, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm., 89.

<sup>6</sup> Ismael Lengah, "Mengapa BPPI Harus Dipugar", *Catatan Pribadi*, 1979, hlm., 4.

<sup>7</sup>*Pertempuran Padang dan Sekitarnya, Konsep Naskah*, 1983, hlm., 10.

Ismael Lengah mulai merekrut laskar yang dipimpin oleh para mantan laskar *Gyugun*. Ini kelak menjadi elemen inti Badan Keamanan Rakyat (BKR), cikal bakal angkatan bersenjata Republik. Pada minggu-minggu berikutnya, tokoh-tokoh BPPI pergi ke kampung-kampung sekitar kota Padang untuk mengumpulkan mantan rekan-rekan dan bawahannya dan memberi pengarahan tentang pembentukan BKR di kampung-kampung setempat. Karena Padang merupakan pusat utama perekrutan dan pelatihan Laskar Rakyat di zaman Jepang, satuan-satuan militer Republik yang terorganisir paling baik pada awal kemerdekaan ditempatkan di Padang dan sekitarnya.<sup>8</sup> BPPI itu sendiri berkembang menjadi kantor penghubung antara badan-badan sipil dan BKR.

Selain membentuk BKR, BPPI juga mengurus pemerintahan pada awal kemerdekaan di Sumatera Barat. Mohammad Sjafei, seorang pendiri Ruang Pendidikan INS Kayutanam, ditunjuk sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatera Barat pada akhir Agustus 1945. Para pemimpin KNI menginstruksikan anggotanya untuk menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan ke seluruh daerah dan mengawasi pembentukan KNI di setiap tingkat-tingkat kewedanan dan nagari.

Tidak lama setelahnya, para pemimpin keresidenan dan bahkan juga di tingkat Provinsi Sumatera Barat menginginkan terwujudnya pemerintahan yang efisien agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya di wilayah yang dikuasai republik. Maka pada awal bulan Oktober 1945, Mohammad Sjafei diangkat menjadi Residen Sumatera Barat yang pertama, meskipun jabatan ini tidak lama beliau pegang. Beliau sekaligus mensahkan pengangkatan pejabat baru yang pada

---

<sup>8</sup>Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm., 157.

masa pemerintahan Belanda dan Jepang pernah memegang posisi yang sama dalam pemerintahan di tingkat luhak (kabupaten), distrik (kewedanan,demang) dan kecamatan.<sup>9</sup>

BPPI pada prinsipnya adalah gejala paling awal dalam periode revolusi. Peranannya semakin kurang penting setelah sebagian besar anggotanya kemudian bergabung dengan tentara republik. Setelah tentara sekutu mendarat di Padang, mereka menganggap BPPI bertanggung jawab atas serangan gerilya terhadap mereka, dan satu-satunya kantor BPPI di Padang menjadi sasaran tindakan pembalasan Inggris. Serangan demi serangan Inggris ini menyebabkan sisa-sisa organisasi ini akhirnya terpaksa bubar pada akhir Januari 1946.

Sampai saat-saat terakhir aktivitas BPPI di Padang walaupun selalu dibawah intipan, pengepungan, penggerebekan serta penangkapan atas wakil ketuanya Suleiman, namun Sekutu dan Belanda tak pernah bisa menemukan bukti bahwa BPPI lah sebenarnya pelopor dari seluruh pergolakan proklamasi kemerdekaan RI di Kota Padang. Jadi teranglah bahwa BPPI dibentuk untuk memelopori Pemerintah Republik Indonesia yang sah di Sumatera Barat sebagai Pemerintah yang berjuang.<sup>10</sup> Meskipun hanya bertahan dalam beberapa bulan, namun BPPI berperan penting dalam rentetan perjuangan kemerdekaan di Kota Padang, karena itulah penelitian ini diberi judul **Peranan BPPI (Balai Penerangan Pemuda Indonesia) Dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Kota Padang 1945-1946.**

---

<sup>9</sup> Audrey Kahin, (1979), *op.cit.*, hlm., 96.

<sup>10</sup>Ismael Lengah, *op.cit.*, hlm., 4.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka perumusan masalahnya akan dikemukakan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya BPPI?
2. Apa peranan BPPI dalam mempertahankan kemerdekaan di Kota Padang?
3. Bagaimana posisi para anggota BPPI setelah dibubarkan?

Penelitian ini memiliki batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasial penelitian ini adalah kota Padang, sebab markas BPPI ini berlokasi di Pasa Gadang. Sedangkan batasan temporalnya mencakup dari tahun 1945 sampai 1946. Menempatkan tahun 1945 sebagai batasan awal karena pada tahun 1945 itu berdirinya BPPI pada tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian menjadikan tahun 1946 sebagai batasan akhir karena tahun 1946 itu berakhirnya BPPI pada akhir Januari 1946.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Membahas Latar Belakang Lahirnya BPPI.
2. Mengkaji peranan BPPI dalam mempertahankan kemerdekaan di Kota Padang.
3. Menganalisis sejauh mana dampak BPPI terhadap perjuangan pada masa revolusi di Kota Padang.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Penulisan mengenai BPPI telah dilakukan oleh Sri Gusti pada tahun 1992. Dalam skripsinya ini, ia mengkaji mengenai lahirnya serta aktivitas BPPI di

Sumatera Barat. Di sini juga digambarkan mengenai hubungan BPPI dengan PRI. Menariknya di penulisan ini ialah, Sri Gusti dapat menemukan tanggal pasti bubarnya BPPI, yaitu tanggal 10 Oktober 1945 sesuai dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Oktober tentang perubahan BKR menjadi TKR. Sedangkan dari sumber-sumber yang penulis temukan, bubarnya BPPI ini tidak dapat dipastikan tanggalnya. Sebab sampai akhir Desember 1945-pun, Nasroen A. S. Masih tetap menerima laporan-laporan dari beberapa anggota BPPI yang masih berfungsi. Sampai akhirnya Nasroen A.S memutuskan untuk membagikan sisa-sisa persediaan yang ada kepada para anggota yang telah berjuang selama 6 bulan terakhir dan memutuskan untuk meninggalkan markas BPPI di Pasa Mudik.

Penelitian tentang sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia telah melahirkan beragam karya sejarah penting. Dibandingkan dengan periode sejarah Indonesia lainnya, Periode sejarah revolusi Indonesia 1945-1950 paling banyak menarik perhatian. Sejarah periode ini telah ditulis sejak revolusi sedang bergulir hingga sekarang sudah banyak sekali karya yang dihasilkan, baik oleh sejarawan asing maupun oleh sarjana Indonesia dalam berbagai perspektif, nasional, lokal dan bahkan Internasional dengan beragam bentuk penulisan seperti biografi tokoh maupun studi kasus.<sup>11</sup>

Karya-karya tersebut telah membantu dalam memahami tentang peristiwa sekitar perang kemerdekaan. Sejarah Perjuangan kemerdekaan di Kota Padang ini diantaranya ialah Mestika Zed, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949 di Kota Padang dan Sekitarnya*. Penulis menunjukkan kekhasan sejarah Perjuangan Kota Padang dari sudut pandang sejarah kota, serta menunjukkan bahwa gejala

---

<sup>11</sup>Audrey Kahin, *ibid.*, hlm.,iii.

perubahan revolusi yang berlangsung dari tahun 1945-1949 itu bukanlah perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, serta bukan hanya perjuangan sekelompok orang, namun perjuangan dari berbagai lapisan masyarakat. BPPI disini, melibatkan seluruh elemen masyarakat tersebut, menjadi gejala awal dari revolusi di Sumatera Barat.<sup>12</sup>

Audrey Kahin, *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*, merupakan salah satu contoh karya 'orang luar' yang mencoba memberikan penilaian kritis terhadap risalah sejarah mengenai salah satu episode sejarah modern Sumatera Barat. Agar memahami secara mendalam tentang episode revolusi di Sumatera Barat, penulis mencoba menelusuri akar persoalan dalam konteks sejarah di tingkat lokal dan hubungannya dengan perkembangan-perkembangan di tingkat nasional.<sup>13</sup>

Fatimah Enar dan kawan-kawan juga meneliti mengenai Sejarah perjuangan kemerdekaan di Sumatera Barat. Sesuai judulnya *Sumatera Barat 1945-1949*, penelitian ini mencakup perjuangan di seluruh wilayah Sumatera Barat.<sup>14</sup>

Begitu juga dengan buku yang ditulis oleh Ahmad Husein dan kawan-kawan, yang berjudul *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/Riau 1945-1950 I*. Tidak hanya di Sumatera Barat, buku ini turut mengkaji tentang perjuangan kemerdekaan di Riau. Di buku juga dibahas mengenai aktivitas para anggota BPPI dalam menyikapi kemerdekaan Indonesia

---

<sup>12</sup>Lihat Mestika Zed dkk., *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949 di Kota Padang dan Sekitarnya*, (Padang, Yayasan Citra Budaya, 2002).

<sup>13</sup>Audrey Kahin, *op. cit.*, iii.

<sup>14</sup>Fatimah Enar dkk., *Sumatera Barat 1945-1949* (Padang: Pemerintah Daerah Sumatera Barat, 1978).

dan menghadapi sekutu yang telah mendarat di Kota Padang. Buku ini mengingatkan kembali apa yang dapat dicapai dengan persatuan sungguh-sungguh bersama rakyat.<sup>15</sup>

### **E. Kerangka Analisis**

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah lokal. Taufik Abdullah mengemukakan bahwa sejarah lokal adalah kisah masa lampau dari suatu kelompok masyarakat yang berada pada tempat tertentu.<sup>16</sup> Berdasarkan corak studi sejarah lokal di Indonesia peranan BPPI pada awal kemerdekaan di Padang termasuk ke dalam studi tematis. Corak studi tematis ini mengangkat perkembangan aspek tertentu dalam kurun waktu tertentu. Aspek-aspek yang dapat ditinjau diantaranya ialah pendidikan, keintelektualan, ide-ide, mentalitas, perkotaan, pedesaan, perekonomian, perdagangan, dll.<sup>17</sup>

BPPI lahir dari hasil pemikiran para pemuda dan tokoh-tokoh di Kota Padang untuk menanggapi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Badan ini merupakan sebuah wadah perjuangan yang berfungsi untuk menampung segala persoalan dan memberikan penjelasan kepada siapa saja yang menanyakan tentang Proklamasi Kemerdekaan.<sup>18</sup> Agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik BPPI memiliki struktur kepengurusan yang memiliki tugas sesuai dengan

---

<sup>15</sup>Ahmad Husein dkk, *Sejarah Perjuangan kemerdekaan RI di Minangkabau Riau 1945-1950 I* (Jakarta: BPSIM, 1991).

<sup>16</sup>Lihat Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm., 15.

<sup>17</sup>Lihat Sugeng Priyadi, *Sejarah Lokal: Konsep, metode dan Tantangannya* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm., 80.

<sup>18</sup>Lihat Mestika Zed, *Somewhere in The Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm., 19.

kedudukan masing-masing dalam organisasi. Kajian ini menyoroti tentang arti penting keberadaan BPPI pada awal kemerdekaan di kota Padang, terutama tentang beberapa tugas penting yang telah dilakukan sehingga BPPI dapat dikatakan sebagai gejala awal dari perang mempertahankan kemerdekaan di Sumatera Barat.

Perang menurut Carl von Clausewith dalam bukunya *“On War”* ialah suatu tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk memaksa lawan kita guna memenuhi keinginan kita.

*“War is an act of violence intended to compel our opponent to fulfil our wil”*<sup>19</sup>

Selain itu Michael gelven dalam bukunya *“War and Existence”* juga mengungkapkan bahwa perang adalah konflik bersenjata yang nyata, luas dan disengaja antara komunitas-komunitas politik yang disebabkan oleh ketidaksepahaman yang tajam atas persoalan pemerintahan.

*“War is instrinsically vast, communal or political and violent. It is an actual, widespread and deliberate armed conflict between political communities, motivated by a sharp disagreeemnet over governance”*.<sup>20</sup>

Konsep mempertahankan menurut W.J.S Poerwadarminta ialah mengusahkan agar tetap atau membiarkan pada keadaan semula. Dapat disimpulkan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah suatu usaha untuk menjaga dan melindungi dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan dalam kehidupan yang bebas dari sistim penjajahan baik dengan jalan diplomasi maupun

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. H. Totok Sarsito, SU, MA., *“Perang Dalam Tata kehidupan Antarbangsa”*, pdf., (Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Teori Politik Internasional) FISIP UNS, Tanggal 19 April 2008.

<sup>20</sup> *Ibid.*

diplomasi. Mempertahankan kemerdekaan merupakan kemampuan bangsa untuk menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Sejarah merupakan hasil rekonstruksi sejarawan mengenai pengalaman masa lampau manusia berdasarkan atas sumber-sumber tercatat (tertulis, lisan, karya-karya seni), atau relik-relik. Agar memperoleh hasil yang baik, maka perlu melakukan tahapan-tahapan metodologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Heuristik adalah tahapan pengumpulan data berupa sumber primer maupun sumber sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Sumber primer diantaranya ialah arsip mengenai riwayat hidup para pejuang kemerdekaan RI di Sumatera Barat/Sumatera Tengah untuk wilayah Kota Padang. Lalu catatan pribadi dari para pengurus inti BPPI seperti Ismael Lengah dan Nasroen A.S. sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI yang ditulis oleh Ahmad Husein, dkk. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/Riau 1945-1950* bagian I&II serta Mestika Zed, *Sejarah perjuangan kemerdekaan 1945-1949 di Kota Padang dan Sekitarnya*. Pengumpulan data-data ini dilakukan di Perpustakaan DHD'45 Sumatera Barat yang berlokasi di bekas gedung BPPI di Pasa Mudik.

Tahapan kedua adalah tahap kritik sumber. Kritik ini dilakukan untuk menguji tingkat kelayakan sebuah data untuk digunakan sebagai sebuah sumber

---

<sup>21</sup> Yoga Fernando Rizqi, "Perjuangan Kyai Haji Gholib Dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Lampung 1945-1949", *skripsi*, (Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), hlm. 13-14.

penelitian yang dilakukan. Beberapa dokumen yang didapatkan ada yang asli dan ada yang sudah di fotocopy. Arsip tentang riwayat hidup pejuang Kemerdekaan RI Di Sumatera Barat/Sumatera Tengah merupakan data asli yang kemudian penulis fotocopy sesuai yang dibutuhkan. Begitu juga dengan surat pribadi dari Noersoe' oed Achir yang merupakan koleksi pribadi yang penulis copy dari surat aslinya. Sedangkan catatan pribadi Simael Lengah merupakan kumpulan tulisan yang telah dibukukan dan diperbanyak. Sedangkan catatan dari Nasroen A.S, *Butir-butir yang berceceran sepanjang jalan revolusi* merupakan kumpulan dari tulisan Nasroen A.S yang dimuat di harian Haluan, yang kemudian dibukukan dan dilengkapi dengan sketsa pribadi Nasroen A.S mengenai keadaan sekitar markas BPPI dari sudut pandangnya. Data-data Pengumpulan sumber serta kritik-kritik terhadap sumber-sumber itu merupakan kegiatan-kegiatan ilmiah (*scientific*).<sup>22</sup>

Tahapan ketiga yaitu tahap interpretasi, yaitu tahapan penafsiran yang merujuk pada fakta-fakta yang didapatkan. Tahapan terakhir adalah historiografi atau penulisan. Fakta-fakta yang dihasilkan akan dideskripsikan dalam bentuk tulisan yang sistematis. Pendeskripsian tentang peristiwa-peristiwa, tentang pelaku-pelaku sejarah, semuanya menggunakan media bahasa sehingga menghasilkan suatu narasi (cerita) sejarah yang menarik dan bermakna.<sup>23</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan.**

Penulisan mengenai BPPI di awal kemerdekaan ini akan dilakukan dalam beberapa bab, yaitu:

---

<sup>22</sup>Lihat Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm., 283.

<sup>23</sup>*Ibid.*

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang melemahnya kekuasaan Jepang di Kota Padang, dimulai dari menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Kemudian dilanjutkan dengan pembubaran kesatuan Gyugun di Sumatera Barat oleh Jepang, hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta.

Bab III mengkaji mengenai lahirnya BPPI. Kelahiran BPPI ini dimulai oleh tanggapan pemuda di Kota Padang terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggapan ini dilaksanakan dengan melakukan pertemuan tokoh-tokoh di Kota Padang hingga tercetuslah Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) di Kota Padang. Diikuti oleh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat dengan beberapa tambahan oleh Mohammad Sjafei.

Bab IV menganalisis mengenai aktivitas BPPI dalam menyikapi kemerdekaan Republik Indonesia. Diantaranya ialah pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai penyokong BPPI sekaligus pelindung masyarakat Sumatera Barat selama awal-awal kemerdekaan. Langkah selanjutnya ialah menyiapkan badan untuk mengurus pemerintahan di Sumatera Barat sekaligus menindak lanjuti keputusan pemerintah pusat untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat Daerah. Hal ini nantinya diikuti dengan pengangkatan residen Sumatera Barat yang pertama.

Bab V berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dari bab sebelumnya.